

PDIP Sindir Politik Bansos Jelang Pemilu di Rezim SBY

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Perjuangan, Hasto Kriyanto menyinggung soal bantuan sosial di era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Coba CSIS hitung berapa biaya Pemilu kita dari pusat hingga ke daerah dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada tahun 2009 dalam politik bansos," kata Hasto dalam paparannya di diskusi CSIS Indonesia bertajuk Menimbang Sistem Pemilu 2024 secara daring, Senin (1/11).

Hasto mengutip pernyataan dari salah satu peneliti luar negeri, bahwa dampak dari penggunaan politik bansos yang dilakukan ini ternyata dinilai membebani APBN akibat pembelanjaan

bansos. "Menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politik populism," ujarnya.

"Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal, yang di Amerika serikat sekarang mengalami krisis, di Eropa juga mengalami krisis," ujar Hasto melanjutkan.

Hasto menegaskan, apa yang disampaikan terkait politik bansos SBY di 2009 merupakan fakta terkait Pemilu. Sehingga, ia menyebut pernyataannya itu tak bermaksud untuk mempolitisasi.

"Jadi tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS. Sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait Pemilu yang lalu," ujarnya. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG DPR
Para Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (tengah), Rachmat Gobel (kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11). Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan pelantikan anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW).

Selain Andika dan Yudo, Nama Dudung Juga Disebut Calon Kuat Panglima TNI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan dalam beberapa hari ke depan akan mengirim Surat Presiden (Supres) soal nama calon Panglima TNI.

JAKARTA (IM) - Selain nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, ternyata nama Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Dudung Abdurachman, juga masuk nominasi sebagai calon

kuat Panglima TNI.

"Ya, saya sudah lama denger nama-nama itu (masuk Calon Panglima TNI)," ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, Senin (1/11).

Menurut Dave, segala kemungkinan siapa yang dapat menjadi Panglima TNI masih terbuka lebar selama sepekan

ke depan. Pasalnya kata dia Surpres Presiden soal Panglima TNI kemungkinan akan dikirimkan hingga 8 November 2021 atau paling cepat setelah Presiden Joko Widodo kembali dari pertemuan G20 di Roma Italia.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandan menyebutkan sampai saat ini belum ada informasi terkait Surpres Calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi.

"Belum ada info pasti," kata Yan Permenas singkat. Sedangkan Anggota

Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta belum mau berkomentar terkait Surat Presiden Calon Panglima TNI.

"Nanti saja kalau Surpres sudah keluar," kata Sukamta. Dari informasi yang beredar di kalangan awak media Parlemen DPR Senayan disebutkan sebenarnya Surpres Panglima TNI sudah ke luar atau akan dikeluarkan secara resmi beberapa waktu kedepan.

Segera Diumumkan

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengungkapkan nama calon Panglima TNI yang dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diumumkan dalam satu dua hari kedepan.

Hal tersebut ia sampaikan usai melaksanakan rapat paripurna pembukaan Masa Sidang II DPR 2021-2022 pada Senin (1/11) di Lobby Gedung Nusantara II Senayan Jakarta. "Kalau lihat pensiunnya Pak Hadi (Panglima TNI) November 2021 maka kemungkinan satu atau dua hari ini," ujar Muhaimin Iskandar, di Lobby Gedung Nusantara II Senayan Jakarta, Senin (1/11).

Ia menyebutkan mekanisme pengajuan nama Calon Panglima TNI akan berlangsung sesuai prosedur dan ketentuan Tatib DPR yang berlaku.

"Seperti biasanya kalau pertimbangan dan kita bahas di Rapat Pimpinan. Kemudian kita sampaikan di Bamus, dan berakhir di Komisi I DPR RI untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna," kata Cak Imin.

Ia menyebutkan setiap kandidat memiliki peluang yang sama. Baca Juga : Selain Nama Andika dan Yudo, Dudung Disebut Kandidat Terkuat Calon Panglima TNI "Semua calon oke, mereka mumpuni dan layak. Tinggal Presiden yang akan menentukan sesuai rencana Presiden secara utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI kita," katanya.

Cak Imin mengaku tidak bisa memprediksi siapa Calon Panglima TNI yang akan terpilih bila dikaitkan dengan salah satu pimpinan TNI mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum berangkat menuju pertemuan G20 di Roma, Italia. "Saya tidak bisa menafsirkan apabila Kasad mendampingi Presiden Jokowi saat akan melaksanakan kunjungan kerja. Saya belum tahu," ujarnya. ● han

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan memakai masker di restoran dan tempat wisata di Bali dan Kepulauan Riau (Kepri) masih kurang dari 60 persen.

Tingkat kepatuhan memakai masker di restoran dan kedai di Bali dan Riau tercatat hanya 20,6 persen. Sementara itu, tingkat kepatuhan memakai masker di tempat wisata di kedua daerah tercatat sebesar 9,9 persen.

"Dari seluruh lokasi kerumunan yang dipantau selama tujuh hari terakhir, restoran dan kedai termasuk ke dalam kategori memakai masker kurang dari 60 persen," ujar Reisa Brotoasmoro dalam keterangan pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/10) lalu.

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker, merupakan titik lemah karena pandemi masih ada. Dengan demikian, jika

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemakaian masker, maka berpotensi terjadi ledakan kasus Covid-19 lagi di Tanah Air.

Reisa meminta masyarakat agar tidak terlalu percaya diri saat melakukan aktivitas tanpa memakai masker. Meski kondisi kasus Covid-19 saat ini sudah landai dan vaksinasi terus berjalan, tetapi belum tuntas menyasar seluruh masyarakat. Oleh karenanya, potensi penularan Covid-19 masih tetap tinggi.

"Ingat program vaksinasi kita belum mencapai 100 persen. Reisa menegaskan, situasi vaksinasi terhadap kelompok rentan yang paling serius adalah lanjut usia (lansia). Sebab, pihaknya masih membutuhkan banyak upaya persuasif agar mereka ikut vaksinasi.

Adapun, catatan ini berdasarkan pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 terhadap kepatuhan protokol kesehatan di kedua daerah yang saat ini dibuka untuk wisatawan asing. ● mar



FOTO: ANT

PENURUNAN TARIF TES PCR

Petugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap RT Polymerase Chain Reaction (PCR) di Skybridge, Bandara SMB II, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (1/11). Untuk meredakan beban masyarakat yang hendak berpergian dan mendorong sektor perekonomian, per 27 Oktober lalu pemerintah secara resmi menetapkan tarif PCR tertinggi di Pulau Jawa-Bali sebesar Rp275 ribu dan Rp300 ribu untuk luar Pulau Jawa - Bali.

DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada Kekosongan Jabatan Panglima TNI

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar pemerintah segera mengirim surat presiden mengenai calon panglima TNI pengganti Marshekal TNI Hadi Tjahjanto dalam waktu dekat. Utut mawanti-wanti agar jangan sampai ada kekosongan jabatan panglima TNI karena Hadi segera memasuki masa pensiun.

"Kalau lihat pensiunnya, saya lupa itu bulan apa pensiunnya, November ya? Ya mungkin 1-2 hari ini ada keputusan," kata Muhaimin. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengungkapkan, surpres mengenai calon panglima TNI akan diserahkan setelah DPR mulai bersidang. Ia menyebutkan, masih ada cukup waktu karena masa jabatan Hadi baru berakhir pada akhir November 2021.

"Secara jadwal, semuanya masih aman, menunggu jadwal DPR sidang lagi. Kita masih ada waktu sampai masuk pensiun panglima di akhir November nanti," ungkap Faldo, Selasa (12/10).

DPR telah memulai masa persidangannya pada Senin (1/11) setelah menjalani masa reses pada 8 sampai 31 Oktober 2021 lalu. ● han

KPK Usut Proses Pengajuan Dana Rehabilitasi untuk Kolaka Timur

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut proses pengajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pengajuan dana tersebut ditilik penyidik lewat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah.

"Jarwansyah (Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait pengajuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah Kabupaten Kolaka Timur," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (1/11).

Jarwansyah diperiksa tim penyidik KPK pada Jumat (29/10). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati non-aktif Kolaka Timur, Andi

Merya Nur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kolaka Timur yang sumber dananya berasal dari hibah BNPB.

Dalam perkara ini, Anzarullah diduga telah menyuap Andi Merya Nur agar perusahaannya bisa mengerjakan proyek pembangunan dua jembatan di Kecamatan Ueasi dan pembangunan 100 rumah di Kecamatan Uluwoi.

Kedua proyek pembangunan jembatan itu bersumber dari dana hibah BNPB sebesar Rp889 juta. Andi Merya Nur dan Anzarullah sepekat nilai suap terkait dua proyek tersebut yakni sebesar Rp250 juta. ● mei

Jenderal Kopassus Ini Sebut Kodam Kasuari Tempat Prajurit Pilihan dan Diperhitungkan

MANOKWARI (IM) - Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) lima jabatan strategis di Kodam XVIII/Kasuari, di Aula Kodam Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Senin (1/11).

Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan pergantian dan mutasi unsur pimpinan di lingkungan kodam XVIII/Kasuari pada dasarnya merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam organisasi TNI AD. "Pergantian dan mutasi ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian dan regenerasi kepemimpinan pejabat di lingkungan Angkatan Darat," ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan, proses pemilihan para Pamen yang akan ditugaskan di wilayah Kodam XVIII/Kasuari sangat diperhitungkan oleh Kasad sehingga orang-orang pilihan.

"Kasad menempatkan kita di sini dengan betul-betul berhitung, orang-orang yang ditempatkan di level Kolonel atau Pamen pejabat utama di Kodam ini beliau betul-betul memperhatikan satu persatu," ucap Pangdam.

Ia menjelaskan, Kodam

Kasuari mencakup daerah rawan konflik dan banyak dinamika sehingga butuh orang-orang yang terpilih tidak hanya Perwira tapi juga termasuk Bintara dan Tamtama.

"Yang baru masuk adalah orang-orang pilihan jadi rasa tanggung jawab harus diberikan kepada satuan dimana kalian berada karena kehormatan adalah segala-galanya," tambahnya.

Ia berharap melalui proses mutasi ini, akan membawa dampak yang positif kepada pengembangan karier pejabat yang akan pindah satuan dari Kodam XVIII/Kasuari.

"Kehadiran pejabat baru diharapkan dapat membawa semangat baru, meningkatkan kinerja dan prestasi satuan jajaran kodam XVIII/Kasuari, saya juga berharap berbagai terobosan dapat dilakukan dalam rangka akselerasi pembangunan Kodam," tegasnya.

Diketahui, lima jabatan tersebut yakni Asisten Personel (Aspers) Kasdam XVIII/Kasuari, Pamen Ahli Bidang Ideologi Politik Sahli Pangdam XVIII/Kasuari, Pamen Ahli Bidang Ekonomi Sahli Pangdam XVIII/Kasuari, Komandan Polisi Militer Ko-

dam (Danpomdam) XVIII/Kasuari dan Kepala Jasmani Kodam (Kajasad) XVIII/Kasuari.

Sertijab tersebut dilaksanakan berdasar Keputusan Kasad nomor 670 tahun 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Angkatan Darat.

Sedangkan pejabat yang melakukan sertijab yaitu Aspers dari Kolonel Inf Nugroho Imam Santoso, S.E., M.M. kepada Kolonel Inf Andre Julian, S.I.P., Pamen Sahli Bidang Ideologi Politik dari Kolonel Arh Tri Sugiyanto, S.Sos., kepada Kolonel Inf Ibnu Jawardi.

Kemudian Pamen Ahli Bidang Ekonomi Sahli dari Kolonel Inf Baginta Bangun, S.I.P. Kepada Kolonel Inf Washington Simanjuntak, Danpomdam dari Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar Kepada Letkol Cpm Sugianto dan Kajasad dari Kolonel Inf Eko Paskah Harisuci kepada Kolonel Inf Drs. Aco Lamama, M.M. Acara digelar dengan sederhana dengan protokol Covid-19 dan diikuti para pejabat dan perwakilan Perwira, Bintara dan Tamtama dilingkungan Kodam XVIII/Kasuari. ● han



IDN: ANT

UPACARA PENYAMBUTAN SATGAS PAMTAS PENYANGGA PAPUA DI MAKASSAR

Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno (kedua kiri) melakukan pemeriksaan pasukan saat upacara penyambutan Satgas Panganan Perbatasan Penyangga (Mobile) RI-Papua Nugini di Lapangan M Yusuf, Kodam XIV Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/11). Sebanyak 450 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 700/Wyc Kodam XIV Hasanuddin telah tiba di Makassar usai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini selama satu tahun.

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA YANG DIKELOLA OLEH PT SYAILENDRA CAPITAL

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana - Reksa Dana sebagai berikut:

1. REKSA DANA SYAILENDRA DANA KAS;
2. REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND;
3. REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND;
4. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM;
5. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA;
6. REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY GARUDA FUND

(untuk selanjutnya disebut "REKSA DANA SYAILENDRA"), yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 22 September 2021, kami, PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA sebagaimana termaktub dalam masing-masing akta addendum REKSA DANA SYAILENDRA.

Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Berkepentingan REKSA DANA SYAILENDRA serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 2 November 2021
Manajer Investasi
REKSA DANA SYAILENDRA
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan